



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Nona Pazalika Putri**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan  
Singingi  
E-mail : [nonafazalikaputri@gmail.com](mailto:nonafazalikaputri@gmail.com)

### **Abstract**

*The formulation of the problem in this study is whether the application of the government financial accounting system in the office of the Hulu Kuantan Sub-District Head has been in accordance with Government Regulation (PP) No 71 of 2010 using the quality method. Source of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Analysis of the data used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verification.*

*The results of this study indicate that the Budget Realization Report at the Upstream Kuantan Camat Office is in accordance with PP No. 71 of 2010. The Balance Sheet at the Kuantan Hulu Subdistrict Office is in accordance with PP No. 71 of 2010. The Cash Flow Statement at the Upstream Kuantan Camat Office is not in accordance with PP No.71 of 2010. Notes on Financial Statements at the Head Office of the Head of the Hulu Kuantan District are not in accordance with PP NO. 71 of 2010. Reports on Changes in Budget Balance at the Office of the Sub-District Head of Hulu are not in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010. The Report of Changes in Equity at the Office of the Sub-District Head of the Hulu Kuantan is in accordance with PP No. 71 of 2010. Operational reports at the Head Office of the Hulu Kuantan sub-district are in accordance with PP No.71 of 2010.*

**Keywords : Budget Realization Reports, Balance Sheet Reports, Cash Flow reports, Notes to Financial Statements, statements of Changes in Over Budget Balance, Statements of Changes in Equity, Operational Reports.**

### **Abstrak**

*Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Hulu kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Laporan Neraca pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Laporan Arus Kas pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Catatan Atas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai*



*dengan PP No 71 Tahun 2010. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Kantor Camat Hulu belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Laporan Operasional pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.*

***Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional.***

## **1. PENDAHULUAN**

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud antaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pemerintah harus menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.

Dari banyaknya masalah pada laporan keuangan saat ini, kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Banyaknya kasus-kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawasan Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada, sehingga berdampak buruk pada kualitas laporan keuangan pusat maupun laporan keuangan daerah (KSAP,2015).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu standar, pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi pemerintah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Maka



penyusunannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah harus dilaksanakan agar ada kesamaan penyusunan laporan keuangan di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh.

Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdapat dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di selenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan masalah pertama yaitu Kantor Camat Hulu Kuantan tidak membuat laporan arus kas. Seharusnya dalam Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah harus memiliki Laporan Arus Kas yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.

Masalah yang kedua adalah pencatatan yang dibuat pemerintah pada Kantor Kecamatan Hulu Kuantan tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 setiap instansi pemerintah harus membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Motivasi peneliti dalam memilih judul penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, peneliti juga tertarik tentang bagaimana kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi**

Menurut (Susanto,2011:124) sistem akuntansi dapat di defenisikan sebagai kumpulan dari sub sistem sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambilan keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

#### **2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintah**

Menurut Abdul Halim (2012:43) pengertian akuntansi pemerintah merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.



### **2.1.3 Siklus Akuntansi Keuangan**

Siklus akuntansi menurut Hery (2014:42) merupakan proses penyusunan seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan sehingga tersusunnya suatu laporan keuangan.

#### **2.1.3.1 Analisis Transaksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, tahapan siklus akuntansi akan dimulai dengan adanya bukti-bukti transaksi yang diperoleh oleh OPD kemudian akan dianalisa untuk dijurnal dan diletakkan pada posisi debit atau kredit nantinya. Peletakan suatu akun disisi debit bukan berarti saldo dari akun tersebut akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, peletakan posisi suatu akun disebelah kredit bukan berarti saldo akun tersebut akan berkurang. Disinilah harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya saldo perkiraan normal dari masing-masing kelompok akun.

#### **2.1.3.2 Jurnal**

Jurnal merupakan catatan yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang lengkap dan permanen dari semua transaksi yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi dimasa mendatang. Tujuan dari penjurnalan adalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi kedalam akun perusahaan. Jurnal digunakan sebagai dasar untuk melakukan posting ke buku besar (Surugi:2011).

#### **2.1.3.3 Buku Besar**

Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, dan ekuitas dana (Surugi,2011). Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke buku besar inilah yang disebut dengan posting. Buku Besar merupakan lanjutan dari jurnal. Posting adalah pemindahan akun-akun sejenis yang sudah dijurnal kedalam kolom yang disebut buku besar. Nantinya, saldo akhir yang ditunjukkan oleh buku besar ini akan dilanjutkan dibawah untuk menyusun laporan keuangan. Berikut adalah contoh buku besar dari suatu perkiraan yang umumnya dipakai (Surugi:2011).

#### **2.1.3.4 Neraca Saldo**

Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah, hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sesuai dengan jumlah yang ada di kredit maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun.

#### **2.1.3.5 Jurnal Penyesuaian**

Jika pada akhir periode akuntansi, terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan maka dicatat dalam jurnal



penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuain dan kemudian dibukukan kedalam buku besarnya. Setelah itu saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis.

#### ***2.1.3.6 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian***

Pada tahap ini, hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat saldo yang seimbang belum tentu benar tetapi saldo yang benar pasti seimbang.

#### ***2.1.3.7 Laporan Keuangan***

Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti :

1. Laporan laba rugi, untuk menggambarkan kinerja perusahaan.
2. Laporan perubahan modal, untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi.
3. Neraca, dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas.
4. Laporan arus kas, memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan.

#### ***2.1.3.8 Jurnal Penutup***

Setelah membuat laporan keuangan, akuntansi harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba-rugi. Caranya adalah dengan me-nol kan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi.

#### ***2.1.3.9 Neraca Saldo Setelah Penutup***

Pada langkah ini, akuntansi menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutup adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib hanya bersifat opsional.

#### ***2.1.3.10 Jurnal Pembalik***



Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan produser pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan maka tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit.

#### ***2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah***

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undang.

##### ***2.1.4.1 Laporan Realisasi Anggaran***

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD, Laporan Ralisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan.

##### ***2.1.4.2 Laporan Neraca***

Pernyataan standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah NO.24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu.

##### ***2.1.4.3 Catatan Atas Laporan Keuangan***

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahan pahaman di antara pembacanya ( Mursyidi 2013:5).

##### ***2.1.4.4 Laporan Arus Kas***

Laporan arus kas merupakan suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.(Rudianto,2012:194).

##### ***2.1.4.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih***



Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **2.1.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut Peraturan Pemerintah No71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun peraporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan Sekurang-kurangnya pos-pos :

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya ; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir

#### **2.1.4.7 Laporan Operasional**

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang di cakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Adapun definisi masing masing unsure dapat dijelaskan sebagai berikut:

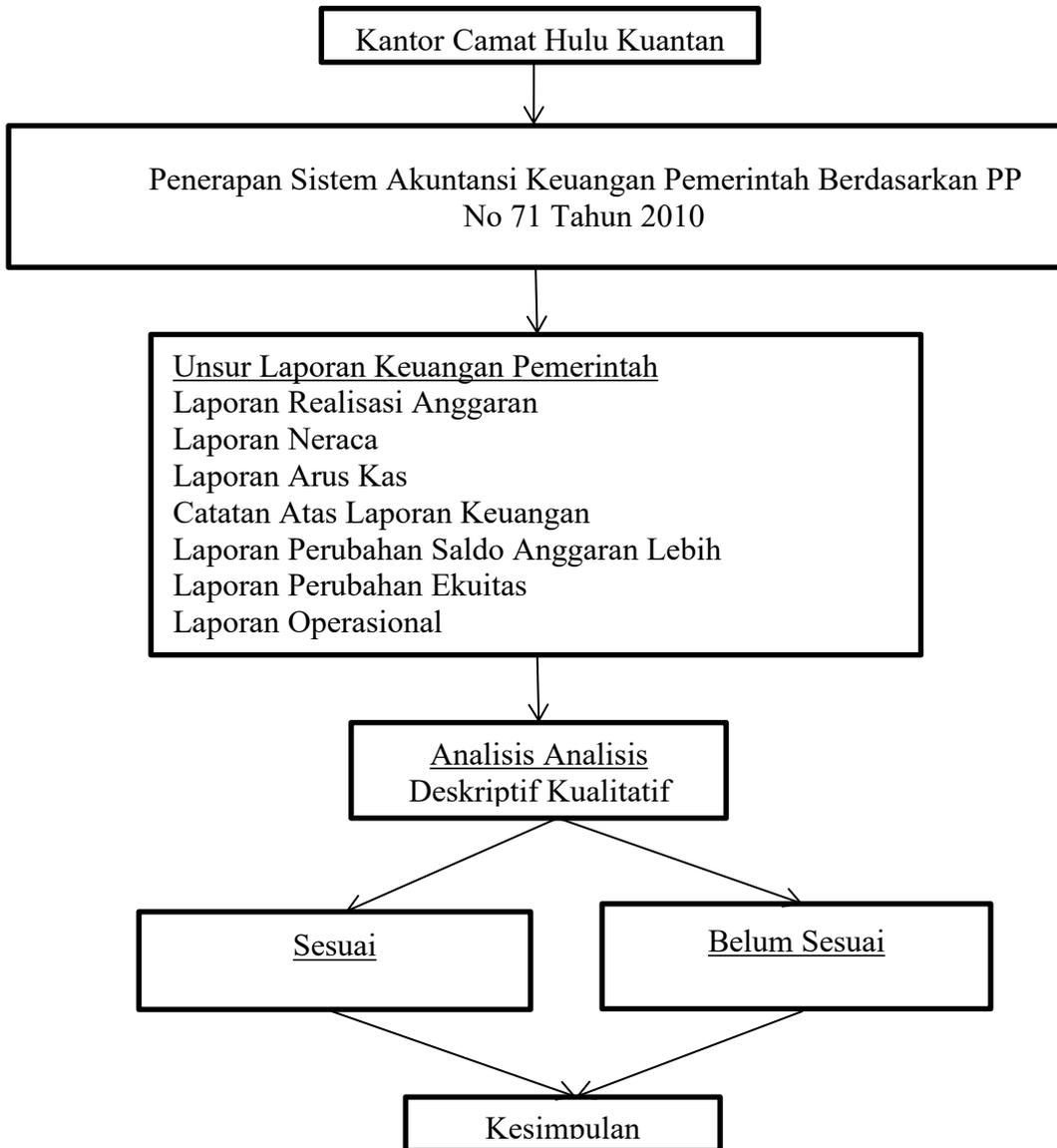
1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Akun Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi bukan merupakan operasi biasa.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mengangkat topik mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat hulu kuantan kabupaten kuantan singingi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.20**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Ningsih (2013)

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Sugiyono (2015:135) Rancangan Penelitian Kualitatif atau desain penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Tujuan dari



rancangan penelitian ini merupakan untuk memberikan rancangan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat meneliti suatu masalah dan memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kantor Camat Hulu Kuantan yang beralamat lengkap di desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi RIAU.

### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah dengan melihat seluruh laporan keuangan sejak tahun (2019-2020) dan pegawai yang bekerja pada Kantor Camat Hulu Kuantan.

#### **3.3.2 Sampel Penelitian**

Sugiyono (2015:136) Sampel adalah sebagian dari populasi itu atau wakil dari objek yang akan diteliti. Sampel penelitian adalah Laporan Keuangan Kantor Camat Hulu Kuantan Periode 2019-2020.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2015:137) metode penelitian deskriptik kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### **3.4.2 Sumber Data**

1. Data primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisional dari data sejarah dan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu (sugiyono,2015:137).
2. Data Sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal (Sugiyono 2015:137).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Sugiyono (2015:204) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat



dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:204) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan keuangan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## 3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, menurut sugiyono (2015) metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih luas. Data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Hulu Kuantan

Kecamatan Hulu Kuantan merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak pada bagian hulu sungai batang kuantan. Sebelumnya Kecamatan Hulu Kuantan ini termasuk kedalam Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian setelah itu Kecamatan Kuantan Mudik dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan dengan Ibu kota Lubuk Ambacang, Kecamatan Kuantan Mudik dengan Ibu kota Lubuk Jambi, Kecamatan Gunung Toar Ibu kota Kampung Baru, dan Kecamatan Pucuk Rantau Ibu kota Pangkalan. Kecamatan Hulu Kuantan dengan luas wilayah 384,40Km, dan terdiri dari 12 desa/kelurahan dan jumlah penduduknya 9.068 jiwa dengan ibukota Lubuk Ambacang.

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Hulu Kuantan

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan realisasi anggaran sudah mencatat akun pendapatan, baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan yang sah. jika dibandingkan dengan PP No 71 Tahun 2010 laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Hulu Kuantan sudah sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan realisasi anggaran telah mencatat akun belanja baik itu belanja operasi, belanja modal, maupun belanja-belanja tak terduga, jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan realisasi anggaran telah mencatat akun transfer, jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai.



#### **4.2.2 Pelaporan Laporan Neraca Kantor Camat Hulu Kuantan**

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan neraca telah mencatat akun aset, jika baik aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun aset lainnya, jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan neraca pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan neraca telah mencatat akun kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan neraca pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan neraca telah mencatat akun ekuitas, baik ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi maupun ekuitas dana cadangan, jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan neraca pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai.

#### **4.2.3 Pelaporan Arus Kas Kantor Camat Hulu Kuantan**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Dalam Paragraf 5, 6, dan 7 PSAP 03 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa laporan arus kas berguna untuk :

1. Sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Sebagai alat pertanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluarselama periode pelaporan.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (Termasuk *Likuiditas* dan *Solfabilitas*).

Sedangkan pada Kantor Camat Hulu Kuantan tidak membuat Laporan Arus Kas, seharusnya dalam instansi Pemerintah di haruskan membuat Laporan Arus Kas karena Laporan Arus Kas termasuk dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

#### **4.2.4 Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Hulu Kuantan**

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas laporan catatan atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan PP No 71 tahun 2010 laporan catatan atas laporan keuangan pada Kantor Camat Hulu Kuantan tidak sesuai, karena dalam PP No 71 Tahun 2010 terdapat 8 Bab sedangkan pada Kantor Camat Hulu Kuantan hanya terdapat 5 bab.

#### **4.2.5 Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Kantor Camat Hulu Kuantan**



Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan tidak membuat Laporan Saldo Anggaran Lebih, seharusnya dalam sebuah Instansi Pemerintah di haruskan membuat Laporan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Saldo Anggaran Lebih termasuk dalam PP No 71 Tahun 2010.

#### **4.2.6 *Pelaporan Perubahan Ekuitas Kantor Camat Hulu Kuantan***

Berdasarkan data yang di peroleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada Laporan Perubahan Ekuitas telah mencatat akun Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO, Koreksi-koreksi maupun Ekuitas Akhir, jika dibandingkan dengan PP No 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Hulu Kuantan sudah sesuai.

#### **4.2.7 *Pelaporan Laporan Operasional Kantor Camat Hulu Kuantan***

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat Hulu Kuantan pada pencatatan atas Laporan Operasional sudah mencatat akun pendapatan, baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, jika dibandingkan dengan PP No 71 Tahun 2010 sudah sesuai .

### **4.3 *Pembahasan***

#### **4.3.1 *Membandingkan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Camat Hulu Kuantan pada Pencatatan Laporan Realisasi Anggaran telah memasukkan unsur Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan Pemerintah Pusat, Pendapatan Pemerintah Provinsi, Lain-lain Pendapatan yang Sah tetapi tidak memiliki hasil Pendapatan. Setelah itu unsur Belanja yang terdiri dari Belanja sebesar Rp.2.423.521.145,47, dan terealisasi sebesar Rp.2.309.295.246,00, atau 75,40%, Belanja Operasi sebesar Rp.2.423.521.145,47, dan terealisasi sebesar Rp.2.309.295.246,00, atau 88,20%, Belanja Pegawai sebesar Rp.1.625.801.705,47, dan terealisasi sebesar Rp.1.616.567.741,00, atau 102%, Belanja Barang sebesar Rp.692.727.505,00, dan terealisasi sebesar Rp.692.727.505,00, atau 66%, Belanja Modal sebesar 6,02% dan Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 26,11%. Sementara itu unsur Transfer yang terdiri dari Transfer/bagi Hasil Pendapatan Ke yang tidak memiliki hasil transfer, sedangkan jumlah Belanja dan Transfer sebesar 75,40%, Surplus(Defisit) sebesar Rp.(2.423.521.145,47), dan terealisasi sebesar Rp.(2.309.295.246,00), atau (75,40%).

Kesimpulan peneliti dari perbandingan yang terdapat dari hasil penelitian dan di lapangan Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan pada Kantor Camat Hulu Kuantan sudah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut PP No 71 Tahun 2010.

#### **4.3.2 *Membandingkan Laporan Neraca Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Hulu Kuantan pada



pencatatan Laporan Neraca Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dimana pada Laporan Neraca pada tahun anggaran 2020 telah menyajikan unsur Aset sebesar Rp. 150.000,00, Kewajiban sebesar Rp.0,00, dan Ekuitas sebesar Rp. 482.229.816,00.

Kesimpulan peneliti dari perbandingan yang didapat dari hasil penelitian dan di lapangan Laporan Neraca yang digunakan pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan Laporan Neraca menurut PP No 71 Tahun 2010.

Alasannya telah memasukkan ungu-unsur Neraca seperti Aset yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Selanjutnya unsur seperti Kewajiban Jangka Panjang, dan Kewajiban Jangka Pendek, dan selanjutnya ada unsur Ekuitas Dana yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

#### ***4.3.3 Membandingkan Laporan Arus Kas Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan yaitu Destriwati,SE dikatakan bahwa Kantor Camat Hulu Kuantan tidak membuat Laporan Arus Kas, Alasannya Karena memang dari dulu tidak ada membuat Laporan Arus Kas seharusnya dalam sebuah instansi Pemerintah di haruskan membuat Laporan Arus Kas karena Laporan Arus Kas termasuk dalam PP No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Keuangan namun didalam penerapannya Kantor Camat Hulu Kuantan belum pernah melakukan pencatatan Laporan Arus Kas.

#### ***4.3.4 Membandingkan Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan data tersebut Kantor Camat Hulu Kuantan hanya melakukan pencatatan atas Catatan Atas Laporan Keuangan dari BAB I hingga BAB V yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja, BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, BAB IV Kebijakan Akuntansi, BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Sementara, menurut PP No 71 Tahun 2010 penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri dari BAB I hingga BAB VIII yaitu BAB I Penutup, BAB II Ekonomi maksro, BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter, BAB IV Ikhtisar Pencapaian Program Entitas Pelaporan, BAB V Kebijakan Akuntansi, BAB VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan, BAB VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan, dan BAB VIII Penutup.

Kesimpulan peneliti dari perbandingan yang didapat dari hasil penelitian dan di lapangan Catatan Atas Laporan Keuangan yang digunakan pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai dengan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010.

#### ***4.3.5 Membandingkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Keuangan Kantor Camat Hulu Kuantan yaitu Destriwati,SE dikatakan bahwa Kantor Camat Hulu Kuantan



tidak melakukan pencatatan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Alasannya Karena dari dulu tidak ada membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih seharusnya dalam sebuah instansi Pemerintah di haruskan membuat Laporan Saldo Anggaran Lebih karena Laporan Saldo Anggaran Lebih termasuk dalam PP No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Keuangan namun didalam penerapannya Kantor Camat Hulu Kuantan belum pernah melakukan pencatatan Laporan Saldo Anggaran Lebih.

#### ***4.3.6 Membandingkan Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya yaitu karena Kantor Camat Hulu Kuantan telah mencatatkan unsur-unsur seperti Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, maupun Ekuitas Akhir.

Berdasarkan data Laporan Perubahan Ekuitas yang diperoleh dari Kantor Camat Hulu Kuantan telah menyajikan sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas menurut PP No 71 Tahun 2010 dimana terdapat pos Ekuitas Awal sebesar Rp. 498.770.462,00, RK PPKD sebesar Rp. 2.309.445.246,00, Surplus/defisit Rp. (2.325.985.892,00), Koreksi dan Ekuitas Akhir Rp. 482.229.816,00.

#### ***4.3.7 Membandingkan Laporan Operasional Kantor Camat Hulu Kuantan Dengan PP No 71 Tahun 2010***

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Laporan Operasional terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur Pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, selanjutnya unsur Beban yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban subsidi, Beban Hibah, Beban Batuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lainnya, Laporan Operasional juga terdapat unsur Pos Luar Biasa yang terdiri dari Pendapatan Luar Biasa, dan Beban Luar Biasa.

Berdasarkan data Laporan Operasional yang diperoleh dari Kantor Camat Hulu Kuantan telah menyajikan sesuai dengan Laporan Operasional menurut PP No 71 Tahun 2010 dimana pada Laporan Operasional Kantor Camat Hulu Kuantan menyajikan unsur Pendapatan Asli daerah sebesar Rp. 0,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 0,00, selanjutnya unsur Beban sebesar Rp. 2.127.666.927,00, Surplus(Defisit) dari Operasi sebesar Rp. (2.325.985.892,00), Surplus(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp. (2.325.985.892,00), dan Surplus (Defisit)-LO sebesar Rp. (2.325.985.892,00).

## **5 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Hulu Kuantan sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya karena Kantor Camat Hulu kuantan telah memasukkan unsur Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah.



Sementara itu unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Dan yang terakhir unsur Pendapatan dan Transfer yang sudah di masukkan kedalam Laporan Realisasi anggaran.

2. Laporan Neraca pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Alasannya telah memasukkan unsur-unsur Neraca seperti Aset yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset lainnya. Selanjutnya unsur Kewajiban seperti Kewajiban Jangka Panjang, dan Kewajiban Jangka Pendek. dan selanjutnya ada unsur Ekuitas Dana yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.
3. Laporan Arus kas pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya yaitu karena Kantor Camat Hulu Kuantan tidak melakukan pencatatan Laporan Arus Kas, baik itu unsur yang terdiri dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Informasi no Keuangan, maupun Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya yaitu karena Catatan Atas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Hulu Kuantan hanya membuat dari BAB I hingga BAB V. Sementara, menurut PP No 71 Tahun 2010 penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri dari BAB I hingga BAB VIII.
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Kantor Camat Hulu Kuantan belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya yaitu karena Kantor Camat Hulu Kuantan tidak melakukan pencatatan Laporan Saldo Anggaran Lebih dan tidak membuat Laporan ini, karena saldo anggaran lebih hanya dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran saja.
6. Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Hulu Kuantan telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya telah mencatatkan unsur-unsur seperti Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, maupun Ekuitas Akhir.
7. Laporan Operasional pada Kantor Camat Hulu Kuantan sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Alasannya yaitu karena Kantor Camat Hulu Kuantan telah menyajikan unsur Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu unsur Beban yang terdiri dari Beban Pegawai, beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lainnya, Surplus /Defisit dari Operasi, dan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Dan juga terdapat unsur Pos Luar Biasa yang terdiri Pendapatan Luar Biasa, Beban Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri



tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi,S.KM., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Zul Ammar , SE.,ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Yul Emri Yulis, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu **Dessy Kumala Dewi,SE., M.Ak** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu peneliti, senantiasa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan memberikan saran dalam membimbing penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak **M. Irwan,SE..MM** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswi.
8. Bapak Camat Hulu Kuantan Jon Hendri,S.Ag.,M.Si yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Seluruh Karyawan Kantor Camat Hulu Kuantan yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data untuk penelitian ini.
10. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, **Alm. Ayahanda (Anwar Demi)** dan **Ibunda (Enro Hani)**, **Alm. Apak (Sudirman)** dan **Amak (Ramaini)** dan **Alm. Kakek (Jahu)** yang selalu senantiasa memberikan do'a, telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, semoga penulis mampu menjadi seperti yang mereka harapkan.
11. Seluruh keluarga besar yang sangat mensupport saya dalam penelitian ini dan memberikan semangat dan masukan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi A angkatan 2017, Teristimewa Pasukan SIANIDA dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afifah, Nunuy. 2015. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung : Prenada Media Group.
- Azhar, Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Perdana*. Bandung : Lingga Jaya.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Cv Andi Offset.
- Danang, Sunyoto. *Metodologi penelitian akuntansi* . Yogyakarta, Mei 2013
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat. *Ibid*, Paragraf 22
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta
- Mulyadi . 2013. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Rosda Karya.
- Nainggolan, Pahala. 2017. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pernyataan Standar akuntansi Pemerintah, Kerangka Konseptual*, Paragraf 21
- Pura, Rahman, *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Palembang.
- Rudianto. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Saledi, Muhammad. 2011. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Palembang : Maxikom.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surigi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Toto, Prihadi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PPM.
- Yoyo, Sudaryo, et. al., *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.
- Zaki, Baridwan. 2010. *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta : BPFE

### Jurnal dan Skripsi:

- Umi, Riyanti. 2011. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitri, Ningsih. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sofia, Dora. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua (studi Kasus pada BPKD Kota Medan)*. Skripsi. Universitas HKBP Nonmensen Medan.
- Indra, Mustika Sari. 2016. *Perlakuan Akuntansi Pendapatan –LO dan Beban pada Pemerintahan Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi*



- Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dewi, Aulia Fatma. 2017. *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Begadai)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Putriasri, Pujanira. 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratiwi, Maharani. 2017. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Magelang Selatan* . Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Fitri, Rahmadani. 2018. *Analisis Penerapan Pernyataan standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.01 tentang Laporan Keuangan Pemerintah pada Pemerintah Kota Subulussalam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Paidi . 2019. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Kholila, Pohan. 2019. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pendidikan dan Pelatihan (diklat) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Lismanita. 2020. *Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat kuantan mudik kabupaten kuantan singingi*. Skripsi. Universitas islam kuantan singingi.
- Maya, Angelicca. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Kusumah. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. ISSN 2302-8552. Universitas Siliwangi.
- Charolina, Ovita dan Husaini Abdullah. 2013. *Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kenerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum*. *Jurnal Fairness Volume 3*, Nomor 3, 2013 :82-94 ISSN : 2303-0348.
- Subaweh dan Nugrheni. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Bandung*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. ISSN 2302-8221. Universitas Gunadarma.

#### **Peraturan dan Undang-Undang:**

- ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara.